

Analisis Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit dan Implikasinya Terhadap Pelaporan Pajak yang Transparan

Muhammad Saad¹, Keumala Elsa Putri², Jennifer Valencia³, Wesly⁴, Dedy Setiawan Ginting⁵, Anjani Rahma⁶

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia

Article Info:

Article history:

Received Date: 12/02/2025

Accepted Date: 16/02/2025

Published Date: 31/05/2025

Keywords:

Tata Kelola Keuangan
Pajak Rumah Sakit
Sistem Informasi Akuntansi
Transparansi Pajak

ABSTRACT

Hospitals as health service institutions, play a critical role not only in medical services but also in complex financial management. This study aims to examine the relationship between the effectiveness of hospital revenue management and tax reporting transparency using a literature review approach. Data were collected from various scholarly journals, books, and official documents relevant to hospital financial management, accounting information system, and taxation. The findings reveal that many hospitals in Indonesia still face challenges in planning, recording, and supervising income, especially from national health insurance programs such as BPJS. Inaccurate accounts receivable recognition and suboptimal use of accounting systems result in misleading tax reporting and increase the risk of manipulation. This study in misleading tax reporting and increase the risk of manipulations. This study emphasizes that effective accounting information systems and wellstructured revenue management significantly contribute to tax reporting transparency and compliance. The recommended policy implications include strengthening internal controls, modernizing technology, and improving fiscal integrity in hospitals. Thus, transparent tax reporting is not merely a sign of compliance, but also reflects the overall integrity of hospital governance.

Corresponding Author:

Muhammad Saad
Universitas Prima Indonesia

1. PENDAHULUAN

Rumah sakit memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional, bukan hanya sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang mengelola pendapatan dari beragam sumber. Pendapatan rumah sakit mencakup jasa pelayanan medis, laboratorium, farmasi, layanan asuransi kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti BPJS, hingga layanan penunjang medis lainnya. Keberhasilan rumah sakit dalam menyelenggarakan layanan kesehatan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan pendapatannya (Fitriya, 2025)

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan pendapatan rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan. Proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengawasan atas penerimaan rumah sakit sering kali belum dilakukan secara efisien dan akuntabel. Ketidakefisienan ini berdampak pada kelancaran arus kas dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan serta laporan pajak. Selain itu, masih banyak rumah sakit yang belum mengoptimalkan sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai alat untuk mengelola dan merekam transaksi secara terintegrasi dan tepat waktu (Riyadi & Bakri, 2024); (Ispaniah et al., 2023). Fenomena lain juga menunjukkan adanya manipulasi data keuangan dan kesalahan pengelolaan pendapatan untuk tujuan menghindari beban pajak, seperti yang ditemukan oleh (Sakti et al., 2024)

Salah satu kasus konkret terjadi di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, di mana terjadi selisih klaim pasien akibat perbedaan tarif antara BPJS dan rumah sakit, serta pengakuan piutang yang tidak tepat karena dokumen pendukung yang tidak lengkap. Di sisi lain, ketidakjelasan dalam penerapan ketentuan pajak seperti PPh 21, PPh 23, dan PPN atas jasa non-medis, serta keterlambatan klaim BPJS menyebabkan risiko fiskal dan hambatan dalam

pelaporan pajak yang transparan (DDTCNews, 2025). Contoh lainnya Beberapa rumah sakit swasta di Sumatera Utara dan Jawa Tengah terbukti melakukan manipulasi diagnosis untuk mendongkrak jumlah tagihan BPJS serta melakukan phantom billing (tagihan fiktif) yang tidak sesuai dengan rekam medis. Modus ini mencakup penambahan jumlah atau jenis perawatan pasien sehingga tagihan membengkak, serta pembuatan klaim atas pasien yang tidak pernah dirawat. Akibatnya, terjadi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dan pelaporan keuangan serta pajak menjadi tidak akurat. KPK, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan BPKP telah melakukan tindakan tegas, termasuk pemutusan kerja sama sementara dan penindakan hukum (Rachman, 2024); (KumparanNEWS, 2024)

Tingginya kompleksitas pendapatan rumah sakit memerlukan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Jika pengelolaan pendapatan tidak dilakukan secara efektif, maka tidak hanya berdampak pada keterlambatan pelaporan keuangan dan pajak, tetapi juga membuka peluang terjadinya fraud, manipulasi data, dan pelanggaran fiskal (Hidayat et al., 2022). Menurut Laporan (DJP, 2023), sektor jasa termasuk kesehatan menjadi salah satu sektor dengan tingkat kepatuhan pajak yang belum optimal. Padahal, dengan tingginya dana yang berputar di rumah sakit, transparansi dalam pelaporan pajak menjadi salah satu indikator integritas institusi publik.

Studi oleh (Vidyantari et al., 2024) menyoroti lemahnya integrasi sistem informasi akuntansi di rumah sakit daerah atau hanya mengkaji regulasi perpajakan tanpa mempertimbangkan sisi manajerial pendapatan dan cenderung memfokuskan kajian pada aspek yang terpisah, seperti efektivitas sistem informasi akuntansi atau kepatuhan pajak secara umum. Padahal, pengelolaan pendapatan yang baik sangat memengaruhi kelengkapan, keakuratan, dan keterbukaan pelaporan pajak. Transparansi pelaporan pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga dengan integritas pengelolaan keuangan rumah sakit, yang pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas dan kepercayaan publik (Fajrin & Astuti, 2022)

Kajian literatur review ini menghadirkan kebaruan dengan menghubungkan secara langsung antara efektivitas pengelolaan pendapatan rumah sakit dan transparansi pelaporan pajak. Fokus utamanya tidak hanya pada sisi teknis akuntansi atau kepatuhan fiskal, tetapi juga pada bagaimana sistem pengelolaan pendapatan yang baik dapat menjadi pondasi bagi pelaporan pajak yang benar, lengkap, dan tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi strategi implementatif untuk membangun sistem yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi perpajakan rumah sakit di Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat tentang bagaimana efektivitas pengelolaan pendapatan rumah sakit memengaruhi tingkat transparansi pelaporan pajak di tengah kompleksitas sumber pendapatan, rendahnya pemahaman peraturan pajak, belum optimalnya sistem informasi akuntansi, dan minimnya keterlibatan lintas fungsi. Tujuannya untuk memahami keterkaitan antara efektivitas pengelolaan pendapatan dan transparansi pelaporan pajak, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak, serta merumuskan strategi perbaikan sistem pengelolaan pendapatan guna meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pajak rumah sakit.

2. TEORI

1. Pajak Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai entitas ekonomi wajib memenuhi berbagai kewajiban perpajakan, meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rumah sakit wajib memenuhi kewajiban pajak sesuai jenisnya, baik sebagai pemotong, pemungut, maupun wajib pajak badan. Pengelolaan pajak yang benar dan transparan sangat penting untuk menjaga kepatuhan dan integritas keuangan rumah sakit (Fitriya, 2025). Rumah sakit juga tetap dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan pajak yang benar dan transparan sangat penting bagi rumah sakit untuk menjaga kepatuhan dan integritas keuangan, serta mendukung pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan kewajiban perpajakan yang tepat menjadi bagian esensial dari tata kelola keuangan rumah sakit yang sehat dan akuntabel (Baderi, 2023).

2. Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit

Pengelolaan pendapatan rumah sakit merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, serta pengendalian terhadap seluruh penerimaan dana yang berasal dari berbagai sumber, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan operasional rumah sakit. Proses ini mencakup pendapatan dari jasa pelayanan medis, laboratorium, farmasi, asuransi kesehatan, termasuk BPJS dan layanan penunjang lainnya. Menurut

(Riyadi & Bakri, 2024) penerapan struktur biaya yang tepat dan pengelolaan pendapatan yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi keuangan rumah sakit, yang secara langsung mendukung akurasi dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sangat penting mengingat laporan keuangan merupakan salah satu instrumen utama bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis dan bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan rumah sakit yang efektif memerlukan penerapan struktur biaya yang tepat, pengelolaan pendapatan rumah sakit yang efektif memerlukan penerapan struktur biaya yang tepat, pengelolaan pendapatan yang terintegrasi, serta pelaksanaan anggaran yang efisien dan fleksibel.

3. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah (SIA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Dalam praktiknya, SIA sangat penting untuk membantu akuntan, manajer, dan pihak eksekutif perusahaan dalam memperoleh data yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa sistem informasi yang andal, organisasi akan kesulitan dalam mencatat serta melaporkan transaksi keuangan secara sistematis. Menurut (Aini, Linda Qurrotul, 2023) sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, pengelompokan, dan pengolahan transaksi sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Apabila Rumah Sakit ataupun sebuah perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang terstruktur dan runtut, entitas tersebut akan mudah mengalami kecurangan ataupun penyelewengan untuk kepentingan suatu kelompok atau pribadi (Fitriani et al., 2022)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi, tetapi juga berperan strategis dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen serta meminimalisir risiko penyalahgunaan dan penyelewengan informasi.

4. Transparansi Pelaporan Pajak

Transparansi pelaporan pajak merujuk pada keterbukaan entitas dalam menyampaikan informasi perpajakan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada otoritas pajak serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut (Hidayat et al., 2022) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan rumah sakit mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Dalam konteks organisasi seperti rumah sakit, transparansi pelaporan pajak bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik dan integritas manajerial. Lebih lanjut oleh (Kamela et al., 2025) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan rumah sakit memiliki dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, karena meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan layanan kesehatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaporan pajak memiliki nilai strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai indikator utama dari tata kelola yang baik. Transparansi memperkuat kredibilitas rumah sakit, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kajian literatur (literature review)**. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam berbagai teori, temuan, dan argument ilmiah yang telah dikaji sebelumnya terkait dengan pengelolaan pendapatan rumah sakit, transparansi pelaporan pajak dan sistem informasi akuntansi rumah sakit. Metode literatur review dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, laporan riset, dan artikel repository dari tahun 2020 hingga 2025.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku akademik, serta dokumen resmi dari instansi terkait, misalnya MekariPajak dan artikel maupun jurnal yang tersedia seperti Google Scholar, SINTA, dan e-journal perguruan tinggi.

Dengan menggunakan metode literatur review, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif dan menyeluruh mengenai keterkaitan antara pengelolaan pendapatan rumah sakit dengan transparansi pelaporan pajaknya, serta mengidentifikasi celah riset yang dapat dikembangkan dalam studi lanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil:

1. Efektivitas pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit
Berdasarkan penelitian oleh (Thiono et al., n.d.) di RSUD Banggai Laut, penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban yang lebih akurat, meskipun transaksi kas belum terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam pengelolaan pendapatan rumah sakit.
Rumah sakit menghadapi tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan pencatatan, dan pengawasan pendapatan, terutama yang bersumber dari JKN/BPJS, laboratorium, farmasi, dan asuransi kesehatan lainnya.
Penelitian (Riyadi & Bakri, 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan yang terintegrasi dan penggunaan struktur biaya yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Ketidaktepatan pengakuan piutang, seperti dalam kasus RS Gunung Maria Tomohon, memperlihatkan adanya kelemahan dalam system pencatatan pendapatan.
2. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Rumah Sakit
Banyak rumah sakit belum mengoptimalkan fungsi SIA untuk pencatatan transaksi secara real-time dan akurat (Ispaniah et al., 2023).
(Aini, Linda Qurrotul, 2023) dan (Fitriani et al., 2022) menekankan bahwa system informasi akuntansi berperan penting dalam meminimalisir potensi fraud dan meningkatkan integritas data keuangan.
3. Transparansi Pelaporan Pajak
Laporan (DJP, 2023) menyebutkan sektor jasa kesehatan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang belum optimal. Transparansi pelaporan pajak ditentukan oleh kelengkapan dan keakuratan data keuangan yang dilaporkan kepada otoritas pajak, serta penerapan kewajiban perpajakan yang tepat, seperti PPh 21, PPh 23, dan PPN atas jasa non-medis.
4. Modus Manipulasi dan Risiko Pajak
Ditemukan praktik fraud seperti manipulasi diagnosis di beberapa rumah sakit swasta (Rachman, 2024) yang berdampak pada pelaporan pajak yang tidak valid dan menyebabkan kerugian negara.
Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal dan belum adanya integrasi system manajerial dengan pelaporan fiskal.

4.2 Pembahasan:

1. Pengelolaan Pendapatan Sebagai Fondasi Transparansi
Pengelolaan pendapatan yang baik berperan sebagai dasar dari pelaporan pajak yang akurat. Jika proses pencatatan pendapatan dilakukan secara disiplin dan berbasis system, maka laporan pajak yang dihasilkan pun akan lebih valid. Hal ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa pendapatan yang tercatat secara akurat akan mencerminkan kewajiban pajak yang benar (Riyadi & Bakri, 2024);(Fitriya, 2025).
2. Peran Kritis Sistem Informasi Akuntansi
SIA membantu rumah sakit dalam mencatat pendapatan dan kewajiban perpajakan secara real time, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan. Ketidakterintegrasinya membuka peluang untuk rekayasa data atau keterlambatan pelaporan. Sehingga, system ini tidak hanya teknis, tetapi juga strategis (Aini, Linda Qurrotul, 2023).
3. Keterkaitan antara Transparansi Pajak dan Kepatuhan
Transparansi pajak merupakan cermin dari manajemen keuangan yang baik. Dalam konteks rumah sakit, ini tidak hanya menyangkut pelaporan fiskal, tetapi juga mencerminkan integritas lembaga di mata public. (Kamela et al., 2025) menyebutkan bahwa rumah sakit dengan pelaporan terbuka cenderung mendapatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi.
4. Penghambat Transparansi : Faktor Internal dan Eksternal
Kelemahan tata kelola, minimnya pelatihan perpajakan, dan belum optimalnya system informasi merupakan faktor internal utama. Sementara itu, kompleksitas regulasi pajak menjadi faktor eksternal yang juga memperbesar risiko ketidakpatuhan dan manipulasi.

5. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi :
Penguatan system internal: melalui pelatihan, SOP perpajakan, dan pengendalian internal.
Modernisasi teknologi: penerapan SIA yang terintegrasi dengan sistem pelaporan fiskal.
Pengawasan reguler: audit internal dan eksternal untuk memastikan integritas pelaporan.
Pendekatan holistik: memperlakukan pajak bukan sebagai beban administrative, tetapi sebagai bagian dari integritas lembaga.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan yang efektif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengawasan penerimaan secara terstruktur dan akuntabel, terbukti menjadi fondasi utama bagi penyusunan laporan pajak yang akurat, lengkap dan tepat waktu. Perpajakan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administrative, melainkan sebagai representasi komitmen terhadap integritas, transparansi, dan tanggung jawab publik. Ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan, seperti yang terjadi di RS Gunung Maria Tomohon, memperlihatkan bahwa lemahnya manajemen pendapatan berkontribusi langsung terhadap ketidaksesuaian pelaporan pajak. Oleh karena itu, integrasi proses keuangan dan pencatatan berbasis prinsip akuntansi sangat penting untuk menjamin validitas data fiskal.

SIA yang diimplementasikan dengan baik mampu mencatat transaksi secara real-time, mengurangi risiko kecurangan, serta meningkatkan akurasi dan keandalan data yang menjadi dasar pelaporan keuangan dan pajak. Dalam praktiknya, masih banyak rumah sakit yang belum mengoptimalkan fungsi SIA, sehingga membuka celah bagi terjadinya manipulasi data dan penundaan pelaporan. SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, melainkan juga merupakan elemen strategis dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pelaporan pajak yang transparan tidak hanya menandakan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan indikator integritas manajemen dan kualitas tata kelola keuangan. Rumah sakit dengan pelaporan fiskal yang terbuka cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Sebaliknya, praktik manipulasi seperti phantom billing dan klaim fiktif atas pasien yang tidak pernah dirawat menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan berujung pada kerugian negara serta penurunan kredibilitas lembaga.

Secara internal, tantangan berasal dari lemahnya pengawasan manajerial, minimnya pemahaman perpajakan, serta belum optimalnya penggunaan sistem informasi. Secara eksternal, regulasi perpajakan yang kompleks, ketidaksesuaian tarif antara BPJS dan rumah sakit, serta keterlambatan klaim menjadi penyebab utama terhambatnya pelaporan pajak yang transparan. Kondisi ini memperbesar risiko fiskal dan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak rumah sakit.

6. SARAN

Untuk meningkatkan transparansi pelaporan pajak, rumah sakit perlu memperkuat pengelolaan pendapatan secara menyeluruh melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur perpajakan yang jelas, serta penguatan pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi yang digunakan harus dioptimalkan dan diintegrasikan dengan sistem pelaporan perpajakan agar meminimalkan kesalahan dan manipulasi data. Selain itu, penting dilakukan pengawasan berkala untuk memastikan keakuratan dan kejujuran laporan keuangan dan perpajakan. Rumah sakit juga sebaiknya menempatkan perpajakan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian integral dari tata kelola institusi yang mencerminkan akuntabilitas dan integritas dalam pelayanan publik.

7. REFERENSI

- Aini, Linda Qurrotul, H. (2023). *ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA RUMAH SAKIT ISLAM SUNAN KUDUS* Linda Qurrotul Aini IAIN Kudus Email: ainilinda68@gmail.com *Husnurrosyidah*. 1(2), 1–23.
- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589–595.
- Baderi, F. (2023). Aspek Pajak Rumah Sakit. In *Harian Ekonomi Neraca*.

- <https://www.neraca.co.id/article/189298/aspek-pajak-rumah-sakit>
- DDTCNews. (2025). Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul “Rumah Sakit Wajib Tahu! Ini Kewajiban Pajak yang Tak Bisa Diabaikan”. Baca selengkapnya: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809141/rumah-sakit-wajib-tahu-ini-kewajiban-pajak-yang-tak-bisa-diabaikan>. In *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809141/rumah-sakit-wajib-tahu-ini-kewajiban-pajak-yang-tak-bisa-diabaikan>
- DJP. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. In *DIrректорat Jenderal Pajak*. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-05/Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-05/Laporan%20Kinerja%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20Tahun%202023.pdf)
- Fajrin, R. M., & Astuti, P. (2022). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang Guna Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 325–335. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34886>
- Fitriani, N. I., Fitri, S. A., Marlin, K., & Melia, Y. (2022). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA RSUD SUNGAI RUMBAI. 2(1), 62–75.
- Fitriya. (2025). Pajak Rumah Sakit dan Jenisnya. In *Mekari klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-rumah-sakit/?utm>
- Hidayat, M. S., Wardhaningrum, O. A., & Andriana, A. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat Di Masa Pandemi Covid-19. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 56–61. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2630>
- Ispaniah, Fitriyah, N., & Mariadi, Y. (2023). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PENDAPATAN RUMAH SAKIT (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 93–104. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i3.875>
- Kamela, H., Pujia., D. P., Susilowati, Yahya, A., & Jatmika, W. (2025). KELENGKAPAN WEBSITE , TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT RSUD DR . CHASBULLAH. 13(1), 27–37.
- KumparanNEWS. (2024). KPK Ungkap Lokasi 3 RS Klaim Fiktif BPJS Kesehatan: Sumatera Utara & Jawa Tengah. In *kumparanNEWS*. https://kumparan.com/kumparannews/kpk-ungkap-lokasi-3-rs-klaim-fiktif-bpjs-kesehatan-sumatera-utara-and-jawa-tengah-23CGWf6D0VC/full?utm_source=chatgpt.com
- Mulani, M. F., & Hafni, D. A. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pelayanan Rawat Inap Di Rumah Sakit X. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 19–28. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4705>
- Nadeak, A. P., & Devano, S. (2024). Analisis Perspektif Konsultan Pajak dalam Menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada Rumah Sakit X Klien SAR Tax & Management Consultant. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1217–1224. <https://doi.org/10.54082/jupin.483>
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 154–166.
- Pakpahan, K., Najib, A., & Pahala, I. (2025). ANALISIS IMPLIKASI PERPAJAKAN PADA TRANSAKSI BUILT OPERATE TRANSFER (BOT), LEASING DENGAN HAK OPSI , JOINT OPERATION , YAYASAN ANALYSIS OF TAX IMPLICATIONS ON BUILT OPERATE TRANSFER (BOT). 4(5), 493–504.
- Rachman, A. (2024). 3 Rumah Sakit Tipu Tagihan Rp 34 M, Ini Ultimatum Bos BPJS Kesehatan. In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240726191630-4-558028/3-rumah-sakit-tipu-tagihan-rp-34-m-ini-ultimatum-bos-bpjs-kesehatan>
- Rahman, K., & Lathief Ilhamy Nst, M. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelayanan Jasa Rawat Inap Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pendapatan Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Mata Smec Medan). *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.538>
- Retnosari, M. C., Suryawati, C., & Harto, P. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(3), 231–240. <https://doi.org/10.14710/jmki.10.3.2022.231-240>
- Riyadi, P., & Bakri, N. F. (2024). Penerapan Struktur Biaya Lingkungan : Analisis Kasus Pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin. ... *Journal (META-JOURNAL)*, 1(2). <http://abadiinstitute.org/index.php/META/article/view/44>

- Sakti, E., Faizah, Y. N., & Maduratna, E. S. (2024). Manipulasi Laba Di Sektor Kesehatan: Studi Sebelum, Saat, Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 80–109. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i1.50484>
- Thiono, A. L., Tinangon, J. J., Datu, C. V, Pengakuan, A., Pencatatan, P., Penyajian, D. A. N., Thiono, A. L., Tinangon, J. J., & Datu, C. V. (n.d.). *ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN PENCATATAN DAN PENYAJIAN PENDAPATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGGAI LAUT*. 13(1), 31–42.
- Vidyantari, P. K., Putra, I. W. G. Y. D., Putri, P. Y. A., & Diana, K. (2024). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGLI Putu. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 644–655.